

# **PENGADILAN AGAMA AMBON**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2019**

Jln. Raya Kebun Cengkeh - Galunggung

Ambon - Maluku 97128

Telp. (0911) 349815

e-mail : [paambon42@yahoo.co.id](mailto:paambon42@yahoo.co.id)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMBON**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2019**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jln. Raya Kebun Cengkeh**

**Telp. (0911) 349815**

**Ambon - Maluku 97128**

**e-mail : paambon42@yahoo.co.id**

# *KATA PENGANTAR*


# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Ambon adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Ambon. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 08 Juli 2019  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
H. MUHAMMAD ALI B., S.Ag.  
NIP.197505092001121001



# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan .....	10
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	13
II. Neraca .....	15
III. Laporan Operasional .....	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	23
A. Penjelasan Umum .....	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca .....	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional .....	47
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	58
Daftar dan Lampiran .....	60
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	61
Daftar Hibah Langsung .....	65

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Agama Ambon

Jln. Raya Kebun Cengkeh - Maluku 97128

Telp. (0911) 349815 e-mail : paambon42@yahoo.co.id

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor satker Pengadilan Agama Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 08 Juli 2019

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



H. MUHAMMAD ALI B., S.Ag.  
NIP.197505092001121001

# *RINGKASAN*

# Ringkasan

---

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Ambon Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 8.032.846,- atau mencapai 21,81 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 36.837.000,-

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp. 3.241.899.774,- atau mencapai 49,53 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 6.545.160.000,-

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2019 dan 2018 . Nilai Aset per 30 Juni 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 39.226.233.231,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 30.299.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 39.141.648.507,- dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 54.285.724,-

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 39.226.233.231,-

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 6.085.846,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 3.643.435.746,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. ( 3,637,349.900,- ) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 1.432.100,- dan surplus(defisit) sebesar Rp. ( 514.900,- ) sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. ( 3.635.917.800,- )

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 39.598.284.103,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. ( 3.635.917.800,- ) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 3.233.866.928,- sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2019 adalah senilai Rp. 39.196.233.231,-

### 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*



# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN AGAMA AMBON**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	36.837.000	8.032.846	21.81	8.297.012
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>36.837.000</b>	<b>8.032.846</b>	<b>21.81</b>	<b>8.297.012</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	5.497.329.000	2.835.049.477	51.57	3.178.137.706
2.	Belanja Barang	B.2.2.	710.631.000	376.350.297	52.96	296.676.510
3.	Belanja Modal	B.2.3.	337.200.000	30.500.000	9.05	2.152.774.312
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>6.545.160.000</b>	<b>3.241.899.774</b>	<b>49.53</b>	<b>5.627.588.528</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN AGAMA AMBON**  
**NERACA**  
**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	30.000.000	0
Persediaan	C. 2.	299.000	12.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>30.299.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C. 3.	7.559.520.000	7.559.520.000
Peralatan dan Mesin	C. 4.	2.410.443.090	2.379.943.090
Gedung dan Bangunan	C. 5.	33.127.600.903	33.127.600.903
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 6.	180.761.900	180.761.900
Aset Tetap Lainnya	C. 7.	5.110.470	5.110.470
Akumulasi Penyusutan	C. 8.	( 4.141.787.856)	(3.697.889.554)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>39.141.648.507</b>	<b>39.555.046.809</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Lain-Lain	C. 9.	242.520.800	242.520.800
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 10.	( 188.235.076)	( 187.436.757)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>54.285.724</b>	<b>55.084.043</b>
<b>Jumlah Aset</b>		<b>39.226.233.231</b>	<b>39.610.142.852</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C. 11.	0	11.858.749
Uang Muka dari KPPN	12.	30.000.000	0
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>30.000.000</b>	<b>11.858.749</b>

Jumlah Kewajiban		11.858.749	11.858.749
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C. 13.	39.196.233.231	39.598.284.103
Jumlah Ekuitas		39.196.233.231	39.598.284.103
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		39.226.233.231	39.610.142.852

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

### III. Laporan Operasional

**PENGADILAN AGAMA AMBON**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6.085.846	8.296.788
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>6.085.846</b>	<b>8.296.788</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	2.834.876.427	3.192.442.466
Beban Persediaan	D. 3	46.973.500	30.989.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	238.301.308	178.747.130
Beban Pemeliharaan	D. 5	61.963.890	65.621.537
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	16.624.000	9.885.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	444.696.621	243.164.603
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>3.643.435.746</b>	<b>3.720.819.736</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>( 3.637.349.900 )</b>	<b>( 3.712.522.948 )</b>
	D. 11		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		1.947.000	0
<b>Jumlah Surplus ( defisit ) Pelepasan Aset Non Lancar</b>		<b>1.947.000</b>	<b>0</b>
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		0	0
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan		0	0

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.536.100	5.724
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.051.000	3.000
Jumlah Surplus (defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	( 514.900)	2.724
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.432.100	2.724
Pos Luar Biasa	D. 12	
Pendapatan PNB	6.085.846	8.296.788
Beban Perjalanan Dinas	16.624.000	9.855.000
Beban Persediaan	46.973.500	30.989.000
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	( 3.635.917.800)	( 3.712.520.224)

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*



## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN AGAMA AMBON**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 JUNI 2019 DAN 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	39.598.284.103	30.847.406.597
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	( 3.635.917.800 )	( 3.712.520.224 )
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	( 181.017 )
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	( 181.017 )
Transaksi Antar Entitas	E. 4	3.233.866.928	5.619.291.516
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 5	(402.050.872)	1.906.590.275
<b>Ekuitas Akhir</b>		<b>39.196.233.231</b>	<b>32.753.996.872</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# *V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

### A. Penjelasan Umum

#### A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Ambon

Visi Pengadilan Agama Ambon adalah "Terwujudnya Pengadilan Agama Ambon yang Agung"

Misi Pengadilan Agama Ambon adalah menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Peningkatan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat
2. Peningkatan sumber daya aparatur peradilan
3. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
4. Peningkatan sarana prasarana Pengadilan Agama Ambon Klas 1A

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Ambon melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor . Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatuentitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Ambon adalah sebagai berikut:

### (1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (2.) Pendapatan LO

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

## (3.) Belanja

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang



tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Penggolongan Kualitas Piutang**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
  - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusunan Aset Tetap

---

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

## Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<b>Software Komputer</b>	4
<b>Franchise</b>	5
<b>Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.</b>	10
<b>Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.</b>	20
<b>Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan</b>	25
<b>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.</b>	50
<b>Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I</b>	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**(6.) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
  - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban

pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Agama Ambon telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

**Tabel Pendapatan Realisasi PNBPN per 30 Juni 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	DIPA	Realisasi 2019
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung Dan Bangunan	2.587.000	2.660.846
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	34.250.000	3.425.000
3.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1.947.000
<b>Total Pendapatan</b>		<b>36.837.000</b>	<b>8.032.846</b>

Perbandingan realisasi PNBP TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2019 dan 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.660.846	1.403.658	1.257.188	47.25
2.	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.425.000	0	3.425.000	100
3.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.947.000	0	1.947.000	100
4.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	6.893.130	6.893.130	100
5.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	224	224	100
<b>Total Pendapatan</b>		<b>8.032.846</b>	<b>8.297.012</b>	<b>(264.166)</b>	<b>(3.29)</b>

## B.1. Belanja

*Realisasi Belanja Negara : Rp 3.241.899.774,-*

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 3.241.899.774,- setelah dikurangi pengembalian belanja atau sebesar 49.53 % dari anggaran senilai Rp. 6.545.160.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	5.497.329.000	2.835.052.156	51.57
Belanja Barang	710.631.000	376.350.297	52.96
Belanja Modal	337.200.000	30.500.000	9.05
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>6.545.160.000</b>	<b>3.241.902.453</b>	<b>49.53</b>
Pengembalian Belanja		(2.679)	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>6.545.160.000</b>	<b>3.241.899.774</b>	<b>49.53</b>

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	2.835.049.477	3.178.137.706	(343.088.229)	(12.11)
Belanja Barang	376.350.297	296.676.510	79.673.787	21.17
Belanja Modal	30.500.000	2.152.774.312	(2.122.274.312)	(6.958)
<b>Total Belanja</b>	<b>3.241.899.774</b>	<b>5.627.588.528</b>	<b>(2.385.688.754)</b>	<b>(73.59)</b>

**B.2.1. Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja  
Pegawai : Rp  
2.835.049.477,-

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 2.835.049.477,- dan Rp. 3.178.137.706,-



Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.125.175.400	1.315.378.240	(190.202.840)	(16.91)
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.525	17.348	177	1.01
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	87.936.770	93.751.832	(5.815.062)	(6.62)
Beban Tunj. Anak PNS	30.779.454	32.532.416	(1.752.962)	(5.70)
Beban Tunj. Struktural PNS	17.460.000	19.620.000	(2.160.000)	(12.38)
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.070.270.000	1.129.790.000	(59.520.000)	(5.57)
Beban Tunj. PPh PNS	179.966.347	180.662.332	(695.985)	(0.39)
Beban Tunj. Beras PNS	55.980.660	67.350.600	(11.369.940)	(20.31)
Beban Uang Makan PNS	143.406.000	199.820.000	(56.414.000)	(39.34)
Beban Tunjangan Umum PNS	16.060.000	24.015.000	(7.955.000)	(49.54)
Beban Tunjangan Kemahalan	108.000.000	115.200.000	(7.200.000)	(6.67)
Hakim				
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2.835.052.156</b>	<b>3.178.137.768</b>	<b>(343.085.612)</b>	<b>(12.11)</b>
Pengembalian Belanja	2.679	68	2.611	97.47
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2.835.049.477</b>	<b>3.178.137.706</b>	<b>(343.088.229)</b>	<b>(12.11)</b>

## B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja  
Barang :  
Rp.376.350.297,-

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 376.350.297,- dan Rp. 296.676.510,-

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	196.720.155	154.756.956	41.963.199	21.34
Belanja Jasa	53.266.852	23.888.317	29.378.535	55.16
Belanja Pemeliharaan	48.560.050	52.212.037	(3.651.987)	(7.52)
Belanja Perjalanan Dinas	46.586.487	9.855.000	36.731.487	78.85
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>345.133.544</b>	<b>240.712.310</b>	<b>104.421.234</b>	<b>30.26</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>345.133.544</b>	<b>240.712.310</b>	<b>104.421.234</b>	<b>30.26</b>

### B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja  
Modal :Rp.  
30.500.000,-

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 30.500.000,- dan Rp. 2.152.774.312,-

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.500.000	27.400.000	3.100.000	10.17
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	2.125.374.312	2.125.374.312	(100)
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>30.500.000</b>	<b>2.152.774.312</b>	<b>(2.122.274.312)</b>	<b>6.958</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>30.500.000</b>	<b>2.152.774.312</b>	<b>(2.122.274.312)</b>	<b>6.958</b>

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:*  
*Rp.30.299.000*

### Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 30.299.000,- dan Rp. 12.000,-

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki atau dipakai atau dijual dalam waktu ( dua belas ) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Ambon per 30 Juni 2019 dan 2018 disajikan pada tabel dibawah :

**Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	30 Juni TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Kas di Bendahara Pengeluaran	30.000.000	0
2.	Persediaan	299.000	12.000
	Jumlah	30.299.000	12.000

### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:*  
*Rp.30.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 12.000,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Uang Tunai di Brankas	29.850.000	0
2.	Uang Di Bank	150.000	0
	Jumlah	30.000.000	0

**C.2. Belanja Dibayar di Muka**

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp. 0,-*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

**Rincian Belanja Dibayar di Muka**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2019	31 Desember TA 2018
1.	Persekot Gaji Pegawai	0	0
	Jumlah	0	0

**C.3. Persediaan**

*Persediaan:  
Rp. 299.000*

Persediaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 299.000 dan Rp. 12.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	30 Juni 2019	31 Desember 2018
1	Alat Perekat	34.000	0
2	Kertas HVS	265.000	0
3	Disket	0	12.000
<b>Total</b>		<b>299.000</b>	<b>12.000</b>

Berita Acara Pemeriksaan Opname Fisik Persediaan No. W24-A1/ /OT.1.2/I/2019 tanggal        bahwa kondisi barang persediaan dalam keadaan baik

#### C.14. Tanah

*Tanah:*  
Rp.7.559.520.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.559.520.000 dan Rp. 7.559.520.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	7.559.520.000
Mutasi Tambah	0
...	...
Mutasi Kurang	0
...	..
Saldo per 30 Juni 2019	7.559.520.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku 30 Juni 2019	7.559.520.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut :

**Rincian Saldo Tanah per 30 Juni 2019**

No.	Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Nilai
1	1400M	Tanah Rata- Galunggung	1.414.395.000
2	2000M	Wara-Air Kuning	1.970.180.000
3	2400M	Kudamati	264.783.000
4	3848M	Jendral Sudirman	3.910.162.000
Jumlah			7.559.520.000

**C.15. Peralatan dan Mesin**

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
321.640.645,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.410.443.090,- dan Rp. 2.379.943.090,-

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	2.2379.943.090
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>30.500.000</b>
...	...
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
...	..
Saldo per 30 juni 2019	2.410.443.090
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(2.088.802.445)
Nilai Buku 30 Juni 2019	321.640.645

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.16. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
31.255.377.392,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 33.127.600.903,- dan Rp. 33.127.600.903

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	33.127.600.903
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
...	...
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
...	...
<b>Saldo per 30 Juni 2019</b>	<b>33.127.600.903</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(1.872.223.511)
<b>Nilai Buku 30 Juni 2019</b>	<b>31.255.377.392</b>

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.17. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan , Irigasi,  
dan Jaringan : Rp  
0,-*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 180.761.900 dan Rp.180.761.900.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	180.761.900
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>0</b>
...	...
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>0</b>
...	...
<b>Saldo per 30 Juni 2019</b>	<b>180.761.900</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	(180.761.900)
<b>Nilai Buku 30 Juni 2019</b>	<b>0</b>

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.18. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya:  
Rp.5.110.470*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.110.470 dan Rp. 5.110.470.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	5.110.470
Mutasi Tambah	0
...	...
Mutasi Kurang	0
...	...
Saldo per 30 Juni 2019	5.110.470
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2019	0
Nilai Buku 30 Juni 2019	5.110.470

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.19. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam  
Pengerjaan : Rp 0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-



### C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
(188.235.076)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp. ( 188.235.076 ) dan Rp. ( 187.436.757 )

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

#### Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.410.443.090	(2.088.802.445)	321.640
2	Gedung dan Bangunan	33.127.600.903	(1.872.223.511)	31.255.377
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	180.761.900	180.761.900	0
4	Aset Tetap Lainnya	5.110.470	0	5.110.470
	<b>Jumlah</b>	<b>35.723.916.363</b>	<b>180.761.900</b>	<b>35.543.154.463</b>

### C.21. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp. 242.520.800,-*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 242.520.800,- dan Rp. 242.520.800,- Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Ambon serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2018	242.520.800
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2019	242.520.800

### C.22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
tetap : Rp  
(188.235.076)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp. ( 188.235.076 ) dan Rp. ( 187.436.757 ) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

#### Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya (dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset Lain-lain	242.520.800	242.520.800
	Nilai perolehan Aset Lainnya		
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
	Nilai buku Aset Lainnya		

### C.23. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari  
KPPN:  
Rp 30.000.000,-*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 30.000.000,- dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.24. Ekuitas

*Cadangan Piutang:  
Rp 39.196.233.231*

Ekuitas per 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 39.196.233.231,- dan Rp.39.598.284.103,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2019 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 0,- dari nilai per 30 Juni TA 2018. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2019 adalah sebesar Rp. 30.000.000 , sedangkan per 30 Juni TA 2019 tercatat sebesar Rp. 39.196.233.231,-

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

**Pendapatan PNbp :** Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 6.085.846,- dan Rp. 8.296.788,- Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.660.846	1.403.658	47.25
2.	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.425.000	0	100
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	6.893.130	(100)
<b>Total Pendapatan</b>		<b>6.085.846</b>	<b>8.296.788</b>	<b>(36.33)</b>

### D.2. Beban Pegawai

**Beban Pegawai : Rp 2.834.876.427,-** Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.834.876.427,- dan Rp. 3.192.442.466,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji Pokok PNS	1.125.009.900	1.328.020.060	(15,28)
2.	Beban Pembulatan Gaji PNS	14.796	17.346	(14,70)
3.	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	87.936.770	95.016.012	(7,45)
4.	Beban Tunj. Anak PNS	30.779.454	32.931.116	(6,53)
5.	Beban Tunj. Struktural PNS	17.460.000	19.620.000	(11,00)
6.	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.070.270.000	1.129.790.000	(5,26)
7.	Beban Tunj. PPh PNS	179.958.847	180.662.332	(0,38)
8.	Beban Tunj. Beras PNS	55.980.660	67.350.600	(16,88)
9.	Beban Uang Makan PNS	143.406.000	199.820.000	(28,23)
10.	Beban Tunjangan Umum PNS	16.060.000	24.015.000	(33,12)
11.	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	108.000.000	115.200.000	(6,25)
<b>Total</b>		<b>2.834.876.427</b>	<b>3.192.442.466</b>	<b>(11,20)</b>

### D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :*  
*Rp.46.973.500,-*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 46.973.500,- dan Rp. 30.989.000,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	46.973.500	30.989.000	51,58
<b>Total</b>		<b>46.973.500</b>	<b>30.989.000</b>	<b>51,58</b>

#### D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang dan  
Jasa : Rp.  
238.301.308,-*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 238.301.308,- dan Rp. 178.747.130,- Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	116.592.733	88.845.803	31.23
Beban Jasa Pos dan Giro	681.500	1.158.000	(41.14)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	18.000.000	18.000.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	53.432.400	39.620.000	34.86
Beban Bahan	0	11.640.500	(100)
Beban Langganan Listrik	45.513.639	11.106.291	309.80
Beban Langganan Telepon	872.036	5.124.161	(82.98)
Beban Langganan Air	2.709.000	3.252.375	(16.70)
Beban Jasa Lainnya	500.000	0	100
<b>Total Beban Jasa</b>	<b>238.301.308</b>	<b>178.747.130</b>	<b>33.31</b>

#### D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban  
Pemeliharaan: Rp.  
61.963.890,-*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 61.963.890 dan Rp. 65.621.537,- Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	600.000	0	0
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	9.212.000	250.000	3.584
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.748.050	51.962.037	(25.43)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	13.403.840	13.409.500	(0.04)
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>61.963.890</b>	<b>65.621.537</b>	<b>(5.57)</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 16.624.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 16.624.000,- dan Rp. 9.855.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	15.874.000	7.455.000	112.93
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	750.000	2.400.000	(68.75)
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>16.624.000</b>	<b>9.855.000</b>	<b>68.68</b>

## D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp .444.696.621,-*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 444.696.621,- dan Rp. 243.164.603,- Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	91.473.714	88.557.165	3.29
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	352.424.588	143.184.343	146.13
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	9.038.095	(100)
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	798.319	2.385.000	(66.52)
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>444.696.621</b>	<b>243.164.603</b>	<b>82.87</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>444.696.621</b>	<b>243.164.603</b>	<b>82.87</b>

## D.8. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp. 0,-*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-) Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang PNBP	0	0	0
<b>Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.9. Beban Lain-lain

**Beban Lain-Lain :** Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah *Rp. 0,-* masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0
<b>Total Beban Lain-lain</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## D.10. Kegiatan Non Operasional

**Beban Kegiatan Non Operasional :** Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:



Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Penjualan Alat Kantor			
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0

## D.11. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar  
Biasa : Rp. 0,-*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa**  
**per 30 Juni TA 2019 dan TA 2018**  
*(dalam satuan Rupiah)*

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan PNPB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
<b>Total Pos Luar Biasa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 39.598.284.103,- dan Rp. 30.847.406.597,-

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. ( 3.635.917.800 ) dan Rp. ( 3.712.520.224 ) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

### E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,- Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

#### E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.... Dan Rp..... Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan  
per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
<b>Total Koreksi Nilai Persediaan</b>	<b>0</b>

### E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-

### E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.... dan Rp..... Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. ( 181.017 ) Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain  
per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.233.866.928,- dan Rp. 5.619.291.516,-

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	3.241.899.774
Diterima dari Entitas Lain	(8.032.846)
Transfer Masuk	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.233.866.928</b>

### E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2019, DDEL sebesar Rp. (8.032.846) sedangkan DKEL sebesar Rp. 3.241.899.774

### E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, sebesar .....- dari total .....- yang diterima sepanjang tahun 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, adalah Rp. 0,-

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2019 disajikan pada lampiran

### E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 39.196.233.231,- dan Rp. 32.753.996.872,-

## F. Pengungkapan Penting Lainnya

### F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Pengadilan Agama Ambon tidak terdapat Kejadian – Kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

### F.2. Pengungkapan Lain-lain

#### F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Pengadilan Agama Ambon Tidak Terdapat Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

#### F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Pengadilan Agama Ambon Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Pengadilan Agama Ambon terdapat satu rekening giro yaitu :

1. Rekening Nomor : 0562.01.000032.30.0 pada Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) Cabang Ambon atas nama BPG 061 Pengadilan Agama Ambon untuk menampung dana DIPA Nomor : SP-DIPA 005.01.2.307754/2017 telah mendapat persetujuan pembukaan rekening dari KPPN Ambon dengan nomor surat : S-518/WPB.29/KP.0.103 tanggal 28 januari 2008

### **F.2.4. Revisi DIPA**

Pengadilan Agama Ambon terdapat 3 kali Revisi DIPA yaitu :

1. Perubahan Akun pendapatan Tanggal 13 Juli 2018
2. Tambahan pagu namlea Tanggal 02 Oktober 2018
3. POK Tanggal 19 Oktober 2018

### **F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB**

Pengadilan Agama Ambon tidak terdapat Ralat SPM, SSBP dan SSPB

### **F.2.6. Catatan Penting Lainnya**

Pengadilan Agama Ambon Tidak Terdapat Catatan Penting Lainnya

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*



*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Ambon

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2018
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>						
1	Alat Bantu	7					
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
3	Alat Bengkel Tak Bermesin	5					
4	Alat Kantor	5					
5	Alat Rumah Tangga	5					
6	Alat Studio	5					
7	Alat Komunikasi	5					
8	Peralatan Pemancar	10					
9	Alat Kedokteran	5					
1	Unit Alat Laboratorium	8					
1	Komputer Unit	4					
1	Peralatan Komputer	4					

<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50					
3	Tugu/tanda Batas	50					
<b>C.</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>						
1	Jalan	10					
<b>D.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-					
<b>E.</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>						
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
2	Alat Kantor	5					
3	Alat Rumah Tangga	5					
4	Alat Komunikasi	5					
5	Komputer Unit	4					
6	Peralatan Komputer	4					
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
8	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50					
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						



## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Agama Ambon**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2018**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
			Jumlah :				



Catatan atas Laporan  
Keuangan

005  
01  
2100  
307754

## LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMBON

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER TAHUN 2018

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT

DRAFT